SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 615-626

Pengaruh Pemikiran Muhammad Iqbal terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer

Milfa Rahma Aulia[1], Hali[2], Naffa'a Naila Aaqilah[3]

[1,2,3]Universitas Siliwangi
241002111093@unsil.ac.id

Kata Kunci:
Muhammad Iqbal; Ekonomi Syariah; Khudi; Keadilan Sosial.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemikiran Muhammad Iqbal terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) melalui pengkajian sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji konsep-konsep utama dalam pemikiran Iqbal serta relevansinya terhadap dinamika ekonomi syariah modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa Muhammad Iqbal memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi syariah melalui konsep *khudi* yang mendorong kemandirian dan produktivitas manusia, integrasi antara akal dan wahyu dalam aktivitas ekonomi, serta pentingnya ijtihad sebagai sarana pembaruan pemikiran ekonomi Islam. Muhammad Iqbal menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta pentingnya keadilan sosial melalui instrumen zakat dan wakaf. Pemikiran tersebut memberikan dasar filosofis bagi pengembangan ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat modern.

Keywords:
Muhammad Iqbal; Islamic economics; khudi; social justice.

Abstract

This article aims to analyze the influence of Muhammad Iqbal's thinking on the development of contemporary Islamic economics. This study uses a qualitative approach with library research through the examination of relevant literature sources such as books, journal articles, and scientific works. Data analysis is carried out descriptively by examining the main concepts in Iqbal's thought and their relevance to the dynamics of modern Islamic economics. The results of the study show that Muhammad Iqbal made an important contribution to the development of Islamic economics through the concept of khudi, which encourages human independence and productivity, the integration of reason and revelation in economic activities, and the importance of ijtihad as a means of renewing Islamic economic thought. In addition, Iqbal emphasized the balance between individual freedom and social responsibility, as well as the importance of social justice through the instruments of zakat and waqf. This thinking provides a

philosophical basis for the development of an Islamic economy oriented towards justice and the welfare of modern society.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut tidak hanya terlihat dari meningkatnya lembaga keuangan syariah, tetapi terlihat juga dari perkembangan kajian akademik yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan dinamika modern. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kontribusi para pemikir besar yang berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan realitas ekonomi kontemporer.[1] Salah satu tokoh pemikir Islam yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer adalah Muhammad Iqbal. Ia dikenal sebagai filsuf, penyair, tokoh filosofis modern, dan pembaru pemikiran Islam yang berupaya membangkitkan kesadaran intelektual dan spiritual umat Islam agar mampu menghadapi tantangan modernitas.[2] Pemikiran beliau memberikan fondasi filosofis dan etika yang menjadi ruh bagi pembangunan ekonomi Islam modern, terutama dalam menekankan pentingnya integrasi antara nilai spiritual, moral, dan aktivitas ekonomi.[3] Menurut pandangannya, kebangkitan umat Islam tidak hanya bergantung pada perubahan politik atau institusi, tetapi juga pada transformasi kesadaran individu yang mendorong kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab sosial dalam berbagai bidang kehidupan.[4]

Salah satu konsep utama dalam pemikiran Muhammad Iqbal adalah konsep *khudi* atau kesadaran diri. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kesadaran terhadap jati dirinya sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, martabat, dan tanggung jawab dalam menentukan arah kehidupannya. Dalam perspektif Muhammad Iqbal, khudi tidak hanya dimaknai sebagai kesadaran diri secara individual, tetapi juga sebagai kekuatan spiritual dan moral yang mendorong manusia untuk menjadi agen perubahan yang kreatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan ekonomi. [5]

Selain mengemukakan konsep *khudi*, Muhammad Iqbal juga memberikan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang berkembang pada masanya. Kapitalisme dinilai terlalu menekankan akumulasi modal serta kepentingan material sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketimpangan sosial.[6] Sedangkan sosialisme dianggap membatasi kebebasan individu dan menghambat kreativitas manusia dalam mengembangkan potensi dirinya.[7]

Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian besar dalam pemikiran Iqbal. Ia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Muhammad Iqbal menekankan pentingnya instrumen zakat dan wakaf. Ia memandang zakat memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga tercipta

---

[1] Umaya Nuraifa Santi, Muh Imran, and Kamiruddin, "Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer: Kontribusi Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf Dan Muhammad Iqbal Abad XII-XIII H/ 18-19 M," *Jurnal Ikraith Ekonomika* 9, no. 1 (2026): 596–605.

[2] Ahmad Maulana, "Mengenal Pemikiran Ekonomi Islam Abad 18-19 (Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra)," *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen)* 5, no. 1 (2021): 96–111.

[3] Santi, Imran, and Kamiruddin, 604.

[4] Nurrohmi Daffa Anwari and Juliana Juliana, "Kontribusi Muhammad Iqbal Dalam Membangun Keadilan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (2025): 9.

[5] Rizkiatul Paidiah et al., "Pemikiran Muhammad Iqbal Tentang Konsep Khudi Dan Relevansinya Bagi Dunia Islam Kontemporer," *Al-Mashadir* 2, no. 1 (2026): 280–81.

[6] Santi, Imran, and Kamiruddin, 599.

[7] Anwari and Juliana.

keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.[8]

Berdasarkan pemikiran tersebut, Muhammad Iqbal menawarkan suatu pendekatan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, negara memiliki peran sebagai fasilitator yang bertugas menciptakan sistem ekonomi yang adil serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.[9] Oleh karena itu, pemikiran Muhammad Iqbal memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemikiran Muhammad Iqbal terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer serta mengkaji relevansi gagasan-gagasannya dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan meneliti berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pemikiran Muhammad Iqbal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah masa kini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal akademik, dan penelitian sebelumnya yang mengupas pemikiran Muhammad Iqbal dan ekonomi syariah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan yang berkaitan dengan konsep pemikiran Muhammad Iqbal serta prinsip-prinsip ekonomi syariah kontemporer. Sedangkan untuk analisis data digunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan serta menganalisis pemikiran Muhammad Iqbal dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi syariah masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab (kini wilayah Pakistan) pada 9 November 1877, dari keluarga Brahmana Kashmir yang telah memeluk Islam. Pendidikan awalnya dimulai di maktab, kemudian dilanjutkan di *Scotch Mission School* dan *Government College*, Lahore. Di bawah bimbingan Maulana Mir Hasan, ia memperdalam sastra dan pemikiran Islam. Pada tahun 1899, ia meraih gelar M.A. di Lahore dan mulai mengajar di *Oriental College* serta *Government College.*[10]

Atas dorongan Thomas Arnold, Iqbal melanjutkan studi ke Eropa pada tahun 1905. Ia belajar filsafat di Universitas Cambridge dan meraih gelar doktor dari Universitas Munich pada tahun 1907 dengan disertasi berjudul *"The Development of Metaphysics in Persia"*. Ia juga menempuh pendidikan hukum dan mempelajari ilmu politik di *School of Political Science.*

[8] Ahmad Maulana, 103.
[9] Anwari and Juliana, 8.
[10] Agus Anwar Pahutar, Saifullah, dan Rusydi AM, "Rekonstruksi Pemikiran Islam Muhammad Iqbal," I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan 1, No. 2 (2024): 151.

Selama di Eropa, Iqbal mendalami pemikiran para filsuf seperti Bergson, Nietzsche, dan Thomas Aquinas, yang turut mempengaruhi gagasannya.[11]

Sekembalinya ke India, Iqbal mengajar filsafat dan sastra Inggris, serta membuka praktik hukum. Ia aktif dalam politik dan terpilih sebagai presiden Liga Muslim India pada tahun 1930. Pada tahun 1922, ia dianugerahi gelar bangsawan, dan pada tahun 1926 menjadi anggota legislatif. Iqbal dikenal sebagai penyair, filsuf, dan pembaru pemikiran Islam yang berpengaruh hingga tingkat internasional.[12]

Latar Sosial-Politik dan Konstruksi Pemikiran Ekonomi Muhammad Iqbal

A. Latar Sosial-Politik Masa Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal lahir dan hidup pada masa transisi penting dalam sejarah anak benua India, yakni ketika Kekaisaran Mughal runtuh dan kekuasaan kolonial Inggris mulai menguasai India. Pergantian rezim tersebut menggerakkan berbagai kekuatan yang menimbulkan perubahan signifikan pada praktik keagamaan dan struktur sosio-politik umat Muslim di kawasan ini.[13] Menurut Pahutar dkk., kolonialisme Inggris tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi dan politik, tetapi juga mempengaruhi identitas kultural dan religius masyarakat India. Sistem pendidikan Barat yang dibawa penjajah, meskipun bertujuan mendukung dominasi intelektual dan kultural Barat, justru dimanfaatkan oleh Iqbal untuk melawan dominasi tersebut dari dalam.[14]

Secara sosial-politik, hubungan antara Muslim dan Hindu semakin tegang. Perbedaan kultur, agama, dan adat kebiasaan membuat kedua komunitas sulit bersatu. Kaum Muslim yang telah termarjinalkan dalam garis politik menghadapi kenyataan pahit: mereka tidak akan mendapatkan tempat yang layak dalam struktur pemerintahan yang didominasi Hindu. Situasi ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan Muslim yang menginginkan jalan sendiri.[15] Dari sisi ekonomi, umat Islam India tertinggal jauh dibanding komunitas Hindu yang lebih dulu beradaptasi dengan sistem ekonomi kolonial. Sistem kapitalisme Inggris yang eksploitatif semakin meminggirkan umat Islam dari kegiatan ekonomi produktif. Kemiskinan struktural dan feodalisme membuat umat Islam terjebak dalam sikap pasif dan statis.

Iqbal menyaksikan bagaimana umat Islam kehilangan semangat kemandirian dan jatuh dalam ketergantungan. Ia melihat bahwa kemunduran umat Islam tidak hanya disebabkan oleh penjajahan fisik, tetapi juga oleh stagnasi intelektual dan spiritual. Menurut Anwari dan Juliana, di tengah situasi historis-sosial tersebut, muncullah pemikiran filosofis Iqbal yang menawarkan wawasan mendalam untuk restrukturisasi sistem ekonomi dan sosial yang berakar pada prinsip-prinsip Islam yang humanistik, etis, dan transformatif.[16]

B. Konstruksi Pemikiran Ekonomi Muhammad Iqbal

Pemikiran ekonomi Muhammad Iqbal terdiri dari landasan filosofis, kritik terhadap sistem ekonomi global, integrasi akal, ijtihad, visi keadilan dan pendidikan. Berikut uraiannya.

1. Landasan Filosofis: Konsep Khudi sebagai Fondasi Ekonomi

[11] Ibid,152.
[12] Anwari and Juliana, 2.
[13] Pahutar, Saifullah, and Rusydi, 149.
[14] Ibid, 50.
[15] Ibid, 151.
[16] Anwari and Juliana, 2.

Pemikiran sosial-ekonomi Muhammad Iqbal sangat tertanam dalam konsep Khudi (kesadaran diri, ego spiritual). Berbeda dengan ego materialistik dalam filsafat Barat, Khudi dalam pandangan Iqbal adalah ego yang diberdayakan secara spiritual dan moral. Khudi mencakup self-reliance (kemandirian), self-respect (harga diri), self-confidence (kepercayaan diri), dan self-assertion (ketegasan) ketika diperlukan, terutama dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan tugas moral sebagai khalifah di bumi.[17]

Dalam pengertian metafisik dan eksistensial, Khudi adalah inti personalitas: kesadaran "aku" yang unik dan riil, yang mengintegrasikan seluruh aspek jiwa dan pikiran manusia, serta menjadi pusat kehidupan mental dan spiritual. Iqbal menolak pandangan mistik klasik yang menyeru penyerahan total diri tanpa upaya manusia (pasifisme spiritual), serta menolak reduksi manusia menjadi sekadar materi dalam pandangan sekuler modern. Ia memperkenalkan visi di mana spiritualitas dan rasionalitas, iman dan aksi, berpadu dalam diri yang utuh.[18]

Dalam konteks ekonomi, konsep Khudi memiliki implikasi mendalam:

a. Kemandirian Ekonomi: Khudi mendorong individu untuk tidak bergantung pada sistem, struktur sosial, atau pihak lain. Manusia sebagai agen aktif memiliki potensi untuk berkembang, berinovasi, dan berkreasi secara kreatif.[19]
b. Etos Kerja dan Produktivitas: Dengan kesadaran diri dan tanggung jawab moral, individu terdorong untuk berkarya secara orisinal, kreatif, dan konstruktif, bukan sekadar mengikuti rutinitas atau menyerah pada determinisme. Iqbal menegaskan bahwa "orang kafir yang aktif dinamis lebih baik daripada muslim yang suka tidur", sebuah kritik tajam terhadap sikap pasif umat Islam.[20]
c. Pemberdayaan Manusia sebagai Modal Insani: Khudi menjadi fondasi bagi inovasi kreatif dan produktivitas, yang dalam ekonomi modern dikenal sebagai human capital. Ketika banyak individu membangkitkan Khudi mereka, terbentuklah komunitas yang dinamis, produktif, dan berkeadilan.[21]

2. Kritik terhadap Sistem Ekonomi Global

Iqbal secara tegas mengkritik kapitalisme Barat, terutama ketika kapitalisme tersebut berubah menjadi materialisme eksploitatif yang mengabaikan dimensi moral, etika kemanusiaan, serta keseimbangan sosial. Ia melihat bahwa peradaban Barat telah kehilangan dimensi spiritual dan hanya mengejar kepuasan material. Dalam syairnya, ia mengatakan "Eropa adalah kematian bagi jiwa dan Asia adalah kematian bagi kehendak."[22]

Pada saat yang sama, Iqbal juga menolak sosialisme ketika sistem tersebut menekan kebebasan pribadi, menghambat kreativitas manusia, dan mengabaikan nilai-nilai spiritual. Melalui perspektif kritis sekaligus konstruktif ini, Iqbal menawarkan kerangka sosial-ekonomi alternatif yang berupaya menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial secara harmonis.[23]

3. Integrasi Akal dan Wahyu dalam Ekonomi

[17] Ibid, 3.
[18] Pahutar, Saifullah, and Rusydi,156.
[19] Anwari and Juliana, 4.
[20] Pahutar, Saifullah, and Rusydi,159.
[21] Anwari and Juliana, 4.
[22] Pahutar, Saifullah, and Rusydi, 157.
[23] Anwari and Juliana, 5.

Dalam kerangka pemikiran Iqbal, relasi antara akal dan wahyu bersifat simbiosis esensial. Wahyu memberikan panduan etis dan spiritual mengenai tujuan akhir kehidupan dan alam semesta, sementara akal berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan wahyu dalam konteks yang berubah. Iqbal mengkritik tren dalam pemikiran Islam yang terlalu menekankan wahyu hingga mengabaikan peran akal, yang menurutnya mengarah pada fundamentalisme dan stagnasi intelektual. Sebaliknya, ia juga mengkritik pemikiran Barat yang cenderung mengabaikan aspek spiritual.[24]

Dalam konteks ekonomi, integrasi ini berarti bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi dan profit, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai etis dan spiritual. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem kapitalisme dan sosialisme.

4. Ijtihad sebagai Metode Pembaharuan Ekonomi

   Iqbal menempatkan ijtihad di pusat upaya pembaruannya terhadap pemikiran Islam. Ia mengkritik penutupan "pintu ijtihad" yang telah mengkristal ke dalam pendekatan statis yang menghalangi kemajuan dan adaptasi Islam dengan realitas baru. Menurut Iqbal, ijtihad adalah alat vital yang harus terus digunakan untuk menjaga Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ilmiah.[25]

   Dalam bidang ekonomi, ijtihad memungkinkan pengembangan instrumen-instrumen keuangan baru yang sesuai dengan prinsip syariah namun mampu menjawab tantangan kontemporer. Produk-produk keuangan syariah seperti sukuk, takaful, dan berbagai skema pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan hasil dari ijtihad kontemporer yang sejalan dengan semangat dinamisme yang diajukan Iqbal.

5. Visi Keadilan Sosial-Ekonomi dan Instrumen Islam

   Kontribusi utama Iqbal dalam pemikiran sosial-ekonomi Islam adalah penekanannya pada tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Iqbal berargumen bahwa pemerintah dalam sistem Islam tidak hanya bertugas menjaga ketertiban politik, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan struktural untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menegakkan keadilan sosial, serta mengatur mekanisme pasar agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak eksploitatif.[26]

   Iqbal mendukung zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib, memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi, serta mampu mendorong mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat kurang beruntung. Selain itu, ia juga mengesahkan peran strategis lembaga wakaf untuk mengembangkan pendidikan, memperluas pelayanan kesehatan, serta membangun infrastruktur sosial yang meningkatkan kualitas hidup umat. Larangan riba juga ditempatkan bukan sekadar persoalan hukum syariah, tetapi sebagai problem etika publik yang menciptakan ketergantungan ekonomi, memperbesar kesenjangan, dan mendorong kapitalisme konsumtif.[27]

6. Pendidikan sebagai Landasan Kemandirian Ekonomi

   Iqbal menekankan bahwa pendidikan merupakan landasan utama bagi kemandirian ekonomi. Ia mengadvokasi reformasi kurikulum yang tidak hanya

[24] Pahutar, Saifullah, and Rusydi,161.
[25] Ibid, 153.
[26] Anwari and Juliana, 5.
[27] Ibid, 6-7.

mengintegrasikan teologi sebagai fondasi moral, tetapi juga mencakup sains, teknologi, dan ekonomi sebagai instrumen penggerak kemajuan peradaban. Pendidikan ideal tidak sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia yang kreatif, mandiri, dan berkepribadian kuat.[28]

Menurut Iqbal, keadilan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa adanya warga negara yang cerdas dan beretika, yang mampu menciptakan inovasi, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Pendidikan harus melahirkan manusia yang tidak terjebak pada dogmatisme, tetapi juga terhindar dari materialisme berlebihan.[29]

Prinsip Keadilan Sosial dan Konsep Kepemilikan dalam Pemikiran Muhammad Iqbal

Pandangan Muhammad Iqbal mengenai keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari peran manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Iqbal menekankan bahwa kebangkitan ekonomi umat tidak hanya bergantung pada perubahan sistem ekonomi, tetapi juga pada transformasi kesadaran moral individu dan penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan sosial menurut Iqbal harus dibangun melalui integrasi antara nilai spiritual, etika sosial, dan aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab.[30]

Pandangan Iqbal mengenai keadilan ekonomi juga tercermin dari kritiknya terhadap sistem kapitalisme yang menimbulkan kehilangan spiritualitas, eksploitasi, dan ketimpangan sosial.[31] Beliau menilai bahwa kapitalisme yang terlalu menekankan akumulasi modal dapat mengabaikan dimensi moral serta keseimbangan sosial. Sistem ekonomi yang ideal menurut Iqbal harus memberikan ruang bagi kepemilikan individu, tetapi tetap diikat oleh tanggung jawab sosial. Ia juga menolak sistem sosialisme yang meniadakan kebebasan individu, karena menurutnya kebebasan dan kreativitas manusia merupakan unsur penting dalam pembangunan masyarakat.[32] Ekonomi Islam harus berfungsi sebagai sistem etika yang menjamin keadilan sosial, melarang riba, dan melindungi kelompok lemah.[33] Dengan demikian, Iqbal menawarkan pendekatan yang menempatkan nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral sebagai dasar bagi sistem ekonomi Islam

Pemikiran Iqbal mengenai keadilan sosial juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, negara tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil serta melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan.[34] Negara perlu mengembangkan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses ekonomi yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat.[35]

---

[28] Pahutar, Saifullah, and Rusydi,162.
[29] Anwari dan Juliana, 8.
[30] Fadlan, Moh Akmal, Ulil Akilah, and Anisa Pratiwi. *Menuju Masyarakat Madani*. Penerbit: Kramantara JS, 2026.
[31] Santi, Imran, and Kamiruddin, 599.
[32] Anwari and Juliana.
[33] Purnomo, Rudi. "Konsep Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Tinjauan Teoritis)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Islam* 13, no. 1 (2025): 37-56.
[34] Jannah, Abidah Syauqiyatul, and Adrina Nadhirah. "PERAN NEGARA DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA." *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 4, no. 8 (2026): 91-97.
[35] Anwari and Juliana.

Dalam kerangka ekonomi Islam, Iqbal juga menekankan pentingnya instrumen sosial seperti zakat dan wakaf sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Instrumen tersebut berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, sistem ekonomi yang dibangun tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan keadilan sosial dalam masyarakat.[36]

Muhammad Iqbal juga memiliki pandangan mengenai konsep kepemilikan dalam kehidupan ekonomi, yang juga berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab sosial.[37]Kepemilikan harta diakui sebagai hak individu, tetapi tidak bersifat mutlak karena harus digunakan untuk kepentingan yang lebih luas dalam masyarakat. Iqbal menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus memastikan distribusi sumber daya yang adil serta mencegah terjadinya monopoli atau eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, kepemilikan individu harus diimbangi dengan kesadaran moral dan kewajiban sosial agar kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu.[38]

Pandangan Muhammad Iqbal mengenai keadilan sosial dan kepemilikan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum atau mekanisme pasar, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan manusia yang beretika dan bertanggung jawab.[39] Integrasi antara nilai spiritual, moral, dan institusi ekonomi menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, gagasan Iqbal memberikan dasar filosofis bagi pengembangan ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[40]

Implikasi Pemikiran Muhammad Iqbal terhadap Model Pengembangan Ekonomi Syariah Modern

Muhammad Iqbal dikenal sebagai pengamat yang tajam terhadap materialisme dari Barat, sebuah pandangan yang menguasai berbagai aspek kehidupan kontemporer, khususnya di dunia Barat. Melalui pemikirannya, Muhammad Iqbal menyoroti secara kritis kecenderungan peradaban modern yang memberikan penekanan berlebihan pada aspek material, sehingga sering kali mengabaikan dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Menurutnya, berkembangnya paham materialisme dalam peradaban Barat modern telah membentuk struktur sosial dan ekonomi yang berorientasi pada akumulasi kapital, persaingan yang tidak terbatas, serta praktik eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun tenaga manusia.[41]

Salah satu pemikiran Muhammad Iqbal yang berpengaruh terhadap ekonomi syariah modern adalah tentang konsep khudi atau kesadaran diri. Konsep khudi atau kesadaran diri merupakan Kesadaran tentang jati diri, di mana manusia dipandang sebagai entitas khas yang diberikan pengetahuan awal mengenai Tuhan dan pilihan bebas (Paidiah dkk, 2026).[42]

[36] Agustin, A. D. (2025). Kontribusi manajemen bisnis syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. *Journal of Islamic Finance and Ekonomics*, *2*(02), 135-150.
[37] Iqbal, Muhammad. "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 2 (2016).
[38] Ibid.
[39] Ira, Maulana. "Rekonstruksi Konsep Keadilan Distributif dalam Membangun Kesejahteraan Sosial Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2026): 34-49.
[40] Ibid.
[41] Pahutar, Saifullah, and Rusydi, 141-168.
[42] Paidiah, et al., 274-286.

Muhammad Iqbal berpendapat bahwa kekuatan yang bergerak maju yang mendorong individu untuk berusaha mempertahankan harga diri dan kemanusiaannya.[43]

Konsep khudi ini juga terkait dalam aspek kejiwaan. Menurutnya, "Khuda" atau Tuhan membangun ikatan yang dinamis dengan "khudi" atau individu, di mana keduanya terlibat aktif dalam proses perkembangan spiritual.[44] Iqbal secara jelas menolak pandangan pantheisme, menekankan bahwa manusia memiliki tujuan untuk mencapai kesempurnaan diri dengan bimbingan Tuhan, yang selalu memberikan arahan.[45]

Dalam konteks tersebut, manusia yang ideal mencerminkan sifat-sifat ilahi, meskipun tetap ada kesadaran akan jarak yang memisahkan individu dari Yang Maha Agung. Ini menciptakan hubungan yang seimbang, di mana keunikan individu dapat bersinergi dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi (Paidiah, 2026). Artinya, penyelamatan jiwa dan kebebasan politik bagi umat Islam hanya dapat tercapai dengan cara meningkatkan kondisi umat Islam sehingga mereka mampu mencapai kemandirian dan kekuatan dalam bidang ekonomi.

Muhammad Iqbal mengemukakan kritik terhadap sistem kapitalisme yang cenderung materialistik dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, serta terhadap sosialisme yang bersifat represif karena membatasi kebebasan individu.[46] Melalui kritik tersebut, Iqbal menawarkan suatu paradigma alternatif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat.[47] Menurutnya, negara seharusnya diposisikan sebagai fasilitator yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan publik, bukan sebagai alat eksploitasi maupun instrumen kontrol yang bersifat totaliter. Negara tidak seharusnya mendominasi hak-hak masyarakat, melainkan berfungsi menyediakan kerangka hukum yang adil, membuka peluang ekonomi yang setara, serta mendukung terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial dalam masyarakat (Nurromi Daffa).

Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran Muhammad Iqbal mengenai pentingnya revitalisasi umat melalui keterlibatan aktif dalam transformasi ekonomi dapat dikaitkan dengan penguatan berbagai instrumen ekonomi Islam, salah satunya adalah Zakat. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu.[48]

Dengan demikan Pemikiran ekonomi syariah modern Muhammad Iqbal menekankan pada keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Pandangannya terhadap sistem ekonomi seharusnya berlandaskan pada nilai keadilan, pemerataan kesejahteraan, serta peran negara sebagai fasilitator yang menciptakan kesempatan ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Pemikiran Muhammad Iqbal memberikan kontribusi fundamental terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer, tidak hanya dalam aspek filosofis, tetapi juga dalam kerangka operasional yang relevan dengan tantangan modern. Melalui konsep khudi,

[43] Wenti, Chesy Veronika Saras. "Kebebasan Kehendak Perspektif Muhamad Iqbal."
[44] Fakih, Muhammad Ali. *Muhammad Iqbal: Biografi dan Intisari Filsafatnya*. DIVA PRESS.
[45] Anwari, Nurrohmi Daffa, and Juliana Juliana. "Kontribusi Muhammad Iqbal dalam Membangun Keadilan Sosial Ekonomi Islam."
[46] Isfihani, Isfihani, and Sutino Sutino. "Kritik Islam Terhadap Determinisme Ekonomi dan Rasionalisasi Sosial: Analisis Tafsir dan Marx dan Weber." *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 1 (2025).
[47] Ridho, Muhammad Rasyid. "Muhammad Iqbal's Thoughts: A Critical Analysis of the Reconstruction of Islamic Thought and Its Relevance to the Present." *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 167-179.
[48] Mubarak, Sahrum. "Zakat sebagai Distribusi Kekayaan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

Iqbal meletakkan fondasi bagi kemandirian ekonomi individu yang menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Khudi mendorong manusia untuk menjadi agen aktif dalam kehidupan ekonomi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta mampu mengaktualisasikan potensi dirinya sebagai modal insani yang unggul.

Lebih dari itu, Iqbal menawarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial melalui kritiknya terhadap kapitalisme materialistik yang eksploitatif dan sosialisme represif yang mengekang kreativitas. Dalam pandangannya, sistem ekonomi yang ideal harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari wahyu, namun tetap membuka ruang bagi rasionalitas dan ijtihad sebagai metode pembaruan yang berkelanjutan. Integrasi antara akal dan wahyu ini menjadi ciri khas ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.

Iqbal juga menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Melalui penguatan instrumen zakat dan wakaf, serta penolakan terhadap riba, ia mengarahkan ekonomi Islam pada distribusi kekayaan yang merata dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Negara, dalam kerangka pemikiran Iqbal, memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, mengatur mekanisme pasar, serta menciptakan iklim ekonomi yang adil dan inklusif.

Dengan demikian, pemikiran Muhammad Iqbal tidak hanya memperkaya wacana akademik ekonomi syariah, tetapi juga memberikan landasan etis dan filosofis yang kokoh bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan kemaslahatan bersama. Relevansi gagasannya tetap aktual dalam menjawab persoalan ketimpangan struktural dan krisis moral ekonomi di era kontemporer.

REFERENSI

Arrida, Ade. "Konsep Khudi Muhammad Iqbal dan Relevansinya dengan Pengembangan Diri."

Anwari, Nurrohmi Daffa, dan Juliana Juliana. "Kontribusi Muhammad Iqbal dalam Membangun Keadilan Sosial Ekonomi Islam." Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia (2025): 1-13.

Maulana, Ahmad. "Mengenal Pemikiran Ekonomi Islam Abad 18-19 (Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra)." JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen) 5, No. 1 (2021): 96–111. https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2827.

Pahutar, Agus Anwar, Saifullah, dan Rusydi AM. "Rekonstruksi Pemikiran Islam Muhammad Iqbal." I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan 1, No. 2 (2024): 148-168.

Paidiah, Rizkiatul, Nayla Latifa, Arjuw Fayyazah, Wetri Pratama Dila, dan Fahmi Akhyar Al-Farobi. "Pemikiran Muhammad Iqbal Tentang Konsep Khudi dan Relevansinya bagi Dunia Islam Kontemporer." Al-Mashadir: Journal of Quranic Sciences and Tafsir 2, No. 1 (2026): 274-286.

Santi, Umaya Nuraifa, Muh Imran, dan Kamiruddin. "Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer: Kontribusi Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf Dan Muhammad Iqbal Abad XII-XIII H/ 18-19 M." Jurnal Ikraith Ekonomika 9, No. 1 (2026): 596-605.

Wenti, Chesy Veronika Saras. "Kebebasan Kehendak Perspektif Muhammad Iqbal."

Purnomo, Rudi. "Konsep Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Tinjauan Teoritis)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Islam* 13, no. 1 (2025): 37-56.

Jannah, Abidah Syauqiyatul, and Adrina Nadhirah. "PERAN NEGARA DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA." *JEBESH:*

JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES 4, no. 8 (2026): 91-97.

Isfihani, Isfihani, and Sutino Sutino. "Kritik Islam Terhadap Determinisme Ekonomi dan Rasionalisasi Sosial: Analisis Tafsir dan Marx dan Weber." *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 1 (2025).

Iqbal, Muhammad. "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 2 (2016).

Agus Anwar Pahutar, Saifullah, dan Rusydi AM, "Rekonstruksi Pemikiran Islam Muhammad Iqbal," I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan 1, No. 2 (2024): 151

Mubarak, Sahrum. "Zakat sebagai Distribusi Kekayaan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

Ira, Maulana. "Rekonstruksi Konsep Keadilan Distributif dalam Membangun Kesejahteraan Sosial Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2026): 34-49.

Agustin, A. D. (2025). Kontribusi manajemen bisnis syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. *Journal of Islamic Finance and Ekonomics*, *2*(02), 135-150.

Fakih, Muhammad Ali. *Muhammad Iqbal: Biografi dan Intisari Filsafatnya*. DIVA PRESS.

Ridho, Muhammad Rasyid. "Muhammad Iqbal's Thoughts: A Critical Analysis of the Reconstruction of Islamic Thought and Its Relevance to the Present." *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 167-179.

Fadlan, Moh Akmal, Ulil Akilah, and Anisa Pratiwi. *Menuju Masyarakat Madani*. Penerbit: Kramantara JS, 2026.